

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
DI KABUPATEN SITANG, KALIMANTAN BARAT
(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1194 K/PDT/2010)**

JELANI CHRISTO PAKSOOL

ABSTRAK

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. Penguasaan tanah yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah berakibat pada penguasaan oleh pihak lain seperti yang terjadi di kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini sengketa pertanahan tersebut sudah mendapatkan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah dalam sengketa kepemilikan tanah antara Stepanus Anyap Alias Lian NyapLiong melawan Direktur Cv. Pang Kahayan Sawmill, Juan Lirong, Akiong Alias Rusdi, Bong Phi Siong Alias Hanafi, Jong JukLan, Sefui Alias Sukandi, Bupati Sintang Presiden Republik Indonesia Di Jakarta Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan Barat Di Pontianak Cq. Bupati Sintang. Dengan metode penelitian normative yuridis dengan pendekatan kasus diketahui bahwa Penerapan undang-undang pokok agraria di Kabupaten Sintang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berdampak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dampak dari penerapan undang-undang pokok agrarian terhadap kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah kepastian hukum pertahanan nasional, namun hal tersebut belum berjalan efektif diakibatkan adanya penyelewengan yang di lakukan oleh pihak terkait guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengesampingkan kepentingan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Penerapan undang-undang pertanahan dalam kasus Putusan Kasasi no 1194 K/PDT/2010 sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Kata Kunci : Implementasi, Pertanahan, Sengketa

**IMPLEMENTATION OF LAW SUBJECT OF AGRARIAN
IN THE DISTRICT SITANG , BORNEO WEST
(A Case Study of the Supreme Court of Cassation Decision
No. 1194 K / PDT / 2010)**

JELANI CRISTO PAKSOOL

ABSTRACT

Land in a legal sense has a very important role in human life because it can determine the existence and continuity of the relationship da legal act, in terms of both individual and impact for others. To prevent the problem of land does not lead to a conflict of interest in the community, the necessary arrangements, possession and use of land, or in other words is called the law of the land. Control of land that is not accompanied by a valid proof of ownership results in domination by others as happened in the Sintang district, West Kalimantan. Currently the land dispute has received the decision of the Supreme Court in cassation is in a land ownership dispute between StepanusAnyap Alias Lian disappeared Liong against Director Cv. Pang Kahayan Sawmill, Juan Lirong, Akiong Alias Rusdi, Phi Bong Siong Alias Hanafi, Juk Jong Lan, Sefui Alias Sukandi, Regent Sintang President of the Republic of Indonesia in Jakarta Cq. Minister of Health of the Republic of Indonesia in Jakarta Cq. Governor of West Kalimantan In Pontianak Cq. Regent Sintang. With normative juridical research method with the approach known case that adoption of key legislation agrarian Sintang not run in accordance with the established provisions and impact on objectives. The impact of the adoption of key legislation to the agrarian land dispute cases that occurred in Sintang is the national defense of legal certainty, but it has not been effective due to the existence of fraud will be undertaken by stakeholders in order to gain personal or group to the exclusion of public interest in accordance with the mandate of the Basic Agrarian Law itself. The application of land laws in the case of Cassation Decision No. 1194 K / PDT / 2010 is in conformity with the Basic Agrarian Law as a basis for providing legal certainty regarding land rights for the people of the whole.

Key Word : *Implementation, Land, Dispute*